

Perkembangan Demokrasi di Tunisia

Rinawati Acan Nurali

Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

rinaacan@gmail.com

Abstract/Abstrak

This paper discusses the development of democracy in Tunisia. The goal is to understand the development of Tunisian democracy which is full of dynamics of the effects of the Arab Spring. This research uses the library method. Data collection through journals and books. The results of this study found that the long journey of the Tunisian people, in achieving independence from the occupation of the Tunisian government itself, was a road that was not easy, steep and sharp. Many became victims, in the name of the revolution. Both physically and psychologically. However, the struggle is carried out not only in the name of religion but also human humanity at stake, the rights and obligations desired by the Tunisian people, who become their driving force in their journey to achieve a democratic government. Of course, this requires a sacrifice in the long journey of democracy in Tunisia. Although in some Middle Eastern countries the process of democratization is still uncertain, Tunisia is not. Tunisia has become a hope for countries in the Middle East to rise from adversity. Tunisia has successfully held elections to democratically appoint a leader. Tunisian democracy is getting better with the inauguration of a new constitution that provides equality between men and women so that Tunisia becomes a pioneer of feminism in the Middle East. Although we cannot compare it with other contexts of Islamic government, Tunisia is a system that continues to rise to renew the slump of democracy by removing the influence of secular, far-right ideologies, and the monarchical system. Therefore, the political dynamics of the state system is a transition period whether it will lead to destruction or even towards democratic maturity, thus there is still optimism for the implementation of Islamic democracy in the Tunisian government system in the midst of all the dynamics that are faced.

Keywords/Kata Kunci: *Tunisia, Arab Spring, Islamic Democracy.*

Pendahuluan

Dewasa ini, spirit untuk kembali membumikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin marak. Namun ganasnya dunia perpolitikan yang ada, sehingga Islam yang secara fitrah dikenal ramah, mengasihi, melindungi hak-hak kaum miskin, tegas, adil dan terbuka tidak berlaku lagi didalam sistem pemerintahan yang otoriter. Seperti yang diketahui, seiring dengan berlangsungnya demokratisasi pasca tergulingnya rezim otoritarianisme di Tunisia. Negara-negara yang menerapkan sistem monarki perlahan mulai dihilangkan, digulirkan dari kursi pemerintahannya oleh mereka masyarakat bawah yang

menginginkan negaranya menjadi sebuah negara yang memenuhi hak-hak masyarakatnya yaitu dengan sistem demokrasi.

Otoritarianisme juga ketidakadilan yang telah merebak luas, mendorong lahirnya gelombang protes yang besar di berbagai negara. Gerakan protes yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah atau yang lebih dikenal dengan Arab Spring, pada dasarnya merupakan panggilan untuk menegakkan demokrasi dan menyuarakan kebebasan.¹ Arab Spring di Tunisia bermula pada awal Desember 2010, ketika itu seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai pedagang buah bernama Mohamed Bouazizi berbuat hal yang nekat didepan kantor pemerintahan. Ia melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan pemerintah yang berkuasa. Para aparat Melakukan tindakan yang merugikan masyarakat kecil, hingga masyarakat bawah yang susah semakin bertambah beban kesusahannya. Lahirnya gerakan pemberontakan yang tidak disangka-sangka sebagai bentuk perlawanan masyarakat kecil, membawa dampak begitu besar. Yang selama itu mereka ditindas, diperlakukan tidak adil, mendapatkan semangat untuk bergerak. Dengan pemantik, yang dilakukan pedagang buah kecil sebagai bentuk kemarahan dirinya terhadap pemerintah yang berkuasa.

Hal ini tentu saja memicu rasa keingintahuan para ahli. Kebangkitan politik yang berasaskan Islam yang berdampingan dengan demokrasi menjadi perhatian banyak para ahli. Politik Islam atau revivalisme politik Islam dalam pandangan Bubalo, memiliki beberapa bentuk diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik.

Masyarakat Tunisia yang memang mayoritas beragama Islam bangkit dari keterpurukan, setelah melihat saudara senasib mereka melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan selama ini. Suara mereka tidak didengar, pemerintah bungkam, perlakuan pemerintah yang tidak sesuai asas Islam, hingga akhirnya gerakan fisik yang menimbulkan dampak yang sangat berarti menjadi pemicu bahwa kemanusiaan manusia harus turut diteriakkan lebih kencang lagi, agar pemerintah bisa mendengar dan melihat aksi masyarakat yang selama ini dibungkam.

Sementara Dekmeijan memandang bahwa revivalisme politik Islam ditandai dengan menguatnya aktivitas keagamaan yang meliputi munculnya partai-partai politik, kelompok-kelompok pergerakan dalam masyarakat Islam. Para pemikir Islam seperti Hasan Al-Banna, AlMaududi, Sayyid Qutb, Khomeini, Muhammad Baqi Sadr, Said Hawa dan lainnya banyak memberikan landasan ideologi pemikiran politik Islam kontemporer. Olivier Roy memandang bahwa politik Islam adalah gaya baru dari sebuah gerakan Islam yang modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang sebenarnya.² Senada dengan Roy, Mohammed Ayoob memandang bahwa Islam bukan sekedar agama tetapi juga sebagai sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep Islamis di ranah publik.³ Penggunaan konsep politik Islam pada akhirnya sering dikaitkan dengan Islamisme yang menganggap bahwa Islam bukan sekedar agama tetapi juga ideologi, nilai, dan doktrin yang memberikan pondasi bagi gerakan sosial. Karenanya menurut Denoux, politik Islam merupakan hasil dari

¹ Nazeer Ahmad, "The 2011 Arab Revolution", www.thehistoryofislam.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2013.

² Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, (Massacusset: Harvard University Press, 1994), hlm. vii-xi.

³ Mohammed Ayoob, *The Many Faces of Political Islam, Religion and Politics in the Muslim World*, (Ann Arbor: The Univesity of Michigan Press, 2008), hlm. 2.

instrumentalisasi ideologi, nilai dan doktrin Islam dalam sebuah organisasi gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik sebagai respons terhadap tantangan dan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam.⁴

Metode

Dalam realitas politik Tunisia saat ini, politik Islam seolah menjadi kekuatan baru yang tidak terbantahkan lagi terutama pasca terjadinya Arab Spring. Menguatnya pengaruh politik Islam di negara Tunisia menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji terutama di tengah menguatnya tuntutan terhadap demokrasi itu sendiri. Untuk itu rumusan masalah dalam makalah ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Perjuangan Demokrasi di Tunisia?
- b. Bagaimanakah demokrasi di Tunisia?

Pembahasan & Hasil

a. Konsep Islam dan Demokrasi

Demokrasi liberal, paling tidak dalam arti pemilihan umum dan jaminan HAM, pasca Perang Dingin saat ini, menurut Fukuyama dalam bukunya *The End of History and the Last Man*, merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Hal ini karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia, dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan (menawarkan jalan keluar dari kemiskinan), dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara kontan. Maka wajar jika demokrasi menjadi pilihan bagi negara-negara dunia, seperti yang dikatakan samuel P. Huntington saat ini sedang berlangsung gelombang demokratisasi ke tiga di dunia⁵.

Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Timur Tengah. sehingga peran dan pengaruh Islam terhadap arah baru politik di kawasan tersebut menjadi isu yang relevan untuk melihat situasi dan kondisi kontemporer. Melihat fenomena yang ada, pengaruh Islam sebagai sumber pertimbangan dan aktivitas politik masih eksis dan terus berlangsung di Timur Tengah. Perdebatan antara syari'at Islam dan sistem demokrasi masih berlanjut, dan bahkan kontestasi sunni-syiah selalu mewarnai perkembangan politik dari level negara hingga regional kawasan Timur Tengah⁶.

Peristiwa penghancuran gedung WTC (*World Trade Center*) dan markas militer Amerika Serikat, ditambah lagi dengan kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara Islam khususnya Timur Tengah dalam melakukan transisi demokrasi, memperkuat pandangan barat bahwa Islam dan demokrasi sebagai produk barat tidak bisa disandingkan. Hal ini juga menjadi justifikasi tesis Huntington, *The Clash of Civilization*, bahwa benturan antara Islam dan Barat sebagai pengganti benturan kapitalisme dan komunisme. Juga

⁴Guilain Deneoux, "The Forgotten Swamp : Navigating Political Islam", Middle East Policy, Vol. IX, No. 2, 2002.

⁵ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002), p. 40.

⁶ Arief Bakhtiar Darmawan, 'Islam Dan Perilaku Politik Di Timur Tengah', *Insignia Journal of International Relation*, 05.01 (2018), 46–57 (p. 56).

membenarkan pendapat simplikatif beberapa intelektual barat seperti Adda Bozeman yang melihat bahwa kultur Islam tidak dibimbing oleh ide-ide kebenaran, atau Max Stackhouse yang mengklaim Islam sebagai tradisi agama yang tidak sesuai dengan konsepsi demokrasi. Bahkan hal yang sama datang dari tokoh dan teoritis Islam, seperti Ali Benhadj dan Sayyid Qutb, yang juga memberikan legitimasi bahwa Islam dan demokrasi tidak *compatible*. Demikian juga yang diyakini oleh Lary Diamond dan Juan Linz tentang kultur politik, bahwa dunia Islam tidak dapat diharapkan bisa melakukan proses transisi ke demokrasi⁷.

Bila memperhatikan fenomena yang ada, sikap skeptis tersebut cukup beralasan mengingat negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terkait kebebasan, kesetaraan, penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi karena hal ini merupakan esensi demokrasi. Diperparah lagi dengan menguatnya sentimen kesukuan, kelompok, agama, mazhab dan sekte yang melahirkan kebijakan-kebijakan penguasa dan elit-elit negara yang tidak berkeadilan sehingga memantik lahirnya konflik-konflik sektarianisme tidak berujung yang menjadi penyebab instabilitas sekaligus batu sandungan dan menghambat proses transisi demokrasi di negara-negara Timur Tengah.

Dalam perkembangan pemikiran politik Islam terkait dengan sistem politik demokrasi, kalangan ulama, intelektual dan aktivis muslim memiliki respon dan kecenderungan yang beragam. Paling tidak, respon terhadap sistem politik demokrasi yang melahirkan tiga kelompok, di antaranya: *pertama*, mereka adalah kelompok yang melihat bahwa Islam dan Demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Demokrasi merupakan produk barat, barat bukan Islam, sehingga demokrasi tidak dapat dijadikan acuan oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. salah satu dari mereka adalah Taqiy Al-Din An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. *Kedua*, kelompok yang memandang Islam berbeda dengan Demokrasi. Mereka tetap mengakui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, namun di saat yang sama juga tidak menafikan adanya perbedaan antara Islam dan Demokrasi. Salah satu tokoh di dalamnya adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. *Ketiga*, mereka adalah kelompok yang mengklaim bahwa Islam membenarkan dan mendukung Demokrasi. Mereka melihat bahwa Islam sebagai sebuah sistem nilai yang senafas dengan prinsip-prinsip demokrasi: keadilan, kesetaraan, kebebasan, musyawarah dan sebagainya⁸.

Untuk melihat komabilitas Islam dan Demokrasi, ini sangat bergantung pada pemahaman dan penafsiran seseorang terhadap Islam itu sendiri. Mereka yang melihat Islam sebagai ajaran dan doktrin yang *rigid*, tertutup dan tidak bisa dirubah lagi, maka jawabannya akan negatif. Berbeda dengan mereka yang melihat Islam sebagai agama dengan ajaran dan nilai-nilai universal yang dinamis, terbuka dengan perubahan yang terus berkembang, dan dapat menerima penafsiran-penafsiran baru, maka jawabannya Islam dan Demokrasi adalah dua entitas yang kompatibel. Dalam konteks ini, Sainul Rahman meyakini bahwa Islam kompatibel, dan dapat bersanding dengan demokrasi. Islam sebagai agama dan sistem nilai *shahih li kulli zaman wal makan*.

Islam memiliki nilai-nilai dasar yang juga terkandung dalam sistem demokrasi: *al-musawah* (kesetaraan), *alhurriyah* (kebebasan), *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-'adalah*

⁷ Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban*, p. 40

⁸ Masykuri Abdillah and Wahid Wahab, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), p. 07.

(keadilan), *al-shura* (musyawarah), dan *almas'uliyat* (pertanggungjawaban). Tentang hak-hak usaha oleh pribadi, masyarakat dan negara meliputi: *hifz al-din* (hak beragama), *hifz al-nafs* (hak hidup), *hifz al-maal* (hak milik pribadi), dan *hifz al-'irdh* (hak mempertahankan nama baik)⁹. Pada akhirnya, seperti ditegaskan oleh Ronald Inglehart dan Pippa Norris, dunia Islam dan Barat sebenarnya sama-sama mendukung demokrasi. Dalam bahasa Samsu Rizal Pangabean, sama sekali tidak ada masalah bagi seorang untuk menjadi muslim di satu sisi dan menjadi demokratis di sisi lain¹⁰.

Seperti halnya kondisi Tunisia, yang merupakan satu problem tak kunjung usai, padahal sebagian negara justru menerapkan demokrasi yang Islami. Sebagai perbandingan, Indonesia salah satu contohnya. Sebagai negara demokrasi dalam naungan Pancasila, Indonesia tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi tanpa harus mengesampingkan sebagian kelompok. Demokrasi Indonesia mengayomi seluruh kelompok ajaran agama maupun mazhab, bahkan yang diluar dari agama resmi pun masih tetap terakomodir. Selain itu, para pendiri bangsa masih menganggap bahwa sistem negara Indonesia merupakan sebuah sistem yang diperjuangkan oleh para ulama sehingga dianggap sistem negara Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islaman.

Dinamika politik Tunisia dengan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki kesamaan secara sosial-agama, masyarakat yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Tapi, gerakan partai politik yang ingin menerapkan Negara Islam di Tunisia disingkirkan oleh presiden Zainal Abidin Bin Ali. Berbeda dengan kelompok Arabisasi Islam yang ada di Indonesia, juga ikut merebak. Munculnya kelompok yang ingin memperjuangkan Negara Islam seperti Hizbuh Tahrir (HTI) yang mendapatkan reaksi keras dari Negara hingga mendapatkan pembubaran. Begitu pula gerakan Front Pembela Islam yang tampak mendapatkan nasib sama dengan HTI yang juga dibubarkan oleh Negara karena dianggap sebagai ancaman demokrasi. Sedangkan NU dan Muhammadiyah yang memiliki akar sejarah di NKRI tetap berupaya menerapkan sistem moderasi beragama, sehingga dikenal sebagai kelompok agama yang nasionalis. Tidak bertentangan dengan prinsip Islam juga demokrasi yang di anut dinegara Indonesia.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang pemerintahannya menggunakan sistem wilayatul faqih dimana kekuasaan tertinggi adalah ulama. Menurut Sudrajat, A. (1996) bahwa kemampuan ulama Negara Iran memberikan tafsiran agama negara, bahkan mampu membuat teori perpaduan politik Islam dan modern sehingga lahirlah sistem teodemokratis. Tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai demokratis pada umumnya, dalam pemilihan presiden. Iran sebagai sebuah negara yang telah mampu keluar dari sistem sekuler kekuasaan Reza Syah Pahlevi, pada akhirnya menemukan sistem baru untuk negaranya yang demokratis, atau disebut demokrasi religius. Sedangkan dinamika yang terus mereka dengungkan adalah dinamika eksternal dengan negara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Itu hal yang bisa dilihat dari kesolidan masyarakatnya atau bahkan kesadaran masyarakatnya akan sistem negara yang ulama. Walaupun demikian, negara tersebut memberi ruang demokrasi yang besar kepada masyarakat non Islam untuk masuk di parlemen.

⁹ Ali Mutakin, 'ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 01 (2016), 25-42 (pp. 32-33).

¹⁰ Muhammad Adib and Nur Qomari, 'Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi', *Maqashid*, 1.2 (2018), 18-33 (p. 20).

Jika melihat sistem pemerintahan Arab yang kerajaan, justru tidak akan relevan dengan konteks demokrasi Tunisia, model pemerintahan monarki dapat dianggap bertentangan dengan sistem demokrasi. Sistem monarki akan menutup ruang keterbukaan pemikiran, akan lebih otoriter dalam penerapan aturannya. Begitu pula dalam pergantian kepemimpinan berdasarkan keturunan akan sangat bertentangan dengan konsep demokrasi.

Olehnya itu, kondisi perpolitikan Tunisia merupakan dinamika tawaran sistem yang belum selesai antara demokrasi dan Islam. Sebagian memperjuangkan sistem pemerintahan Islam, sebagiannya lagi ingin memperjuangkan Islam sekuler tapi pasca jatuhnya Presiden Zainal Abidin Bin Ali telah muncul upaya demokratisasi Islam.

b. Perjuangan Demokrasi di Tunisia

Arab Spring atau Musim Semi Arab, merupakan gelombang gerakan rakyat akar rumput yang terdiri dari berbagai profesi, yang menginginkan sebuah perubahan besar yang dapat membawa mereka pada sebuah situasi hidup yang lebih baik. Mengingat situasi dan kondisi negara-negara mereka yang semakin tidak menentu; ekonomi melemah, angka kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang semakin banyak, ketimpangan dan kesenjangan sosial semakin lebar, kebebasan hidup dan politik yang dibelenggu oleh rezim-rezim yang berkuasa. Arab Spring juga dapat dikatakan sebagai revolusi yang menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, sebuah sistem yang terbuka, transparan, berasaskan pada kebebasan dan keadilan.

Situasi ini dapat dimaklumi bila melihat keadaan para pemimpin negara-negara Arab yang memimpin dan menjabat dengan kurun waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Hal ini membuat para rezim semakin kuat dan cenderung diktator dan sewenang-wenang dalam memimpin. Arab Spring atau Musim Semi Arab, merupakan kosa kata politik baru dalam kamus politik Timur Tengah. Arab Spring menjadi sebuah simbol dari jatuhnya para pemimpin otoriter di negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Hal ini juga dianggap sebagai sebuah momentum dan peluang berharga untuk menuju kebangkitan dan perubahan besar di kawasan Timur Tengah, termasuk lahirnya sebuah sistem politik dan pemerintahan demokratis, yang terbuka dan berkeadilan sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di tengah kekayaan alam yang melimpah¹¹.

Gelombang *Arab Spring* yang telah menyapu sebagian besar negara-negara di Timur Tengah pertama kali terjadi di Tunisia. Hal ini dipicu oleh pembakaran diri yang dilakukan oleh seorang anak muda, dengan berlatar belakang sarjana, yang berprofesi sebagai pedagang buah. Muhammad Bouazizi melakukan aksi nekatnya dalam keadaan frustrasi yang mendalam atas sikap aparat yang telah merampas dagangan yang merupakan mata pencahariannya dan tidak kunjung dikembalikan barang dagangannya tersebut. Aksi nekat itu sebagai respon dan protes keras terhadap perilaku sewenang-wenang dan tidak berkeadilan yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah lokal di bawah rezim otoriter Zaenal Abidin bin Ali.

Muhammad Bouazizi bukan seorang ideolog, bukan juga pemimpin gerakan ataupun orator ulung yang hendak membakar diri demi sebuah cita-cita agung. Aksi yang ia lakukan diyakini sebagai reaksi individual atas keadaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Namun,

¹¹ Ahmad Sahide, *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*, cet. I (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), p. 136.

ternyata aksi nekatnya telah menggantikan tugas-tugas yang gagal dilakukan oleh para ideolog, para pemimpin gerakan, dan para orator di negara-negara Arab selama ini. Selama sekitar empat dekade ini, semua ideolog besar, pemimpin-pemimpin gerakan dan para orator oposan yang muncul di hampir seluruh negara Arab dengan berbagai latar belakang spektrum

ideologi dan agendanya, telah gagal melakukan perubahan terhadap kondisi politik represif, monopoli ekonomi di sekitar penguasa, ketimpangan ekonomi di masyarakat dan ketidakadilan sosial¹².

Bukan tanpa alasan mereka tidak berhasil melakukan perubahan, dilihat dari sikap pemimpin yang otoriter, yang menghalalkan segala cara untuk menghentikan para oposisi yang bergerak sebagai bentuk pertahanan diri atas kekuasaan yang tidak ingin dilepaskan. Pemimpin Ben Ali, selalu mengawasi setiap gerakan yang dilakukan oleh para aktor intelektual tersebut, bahkan partai Islam pun dibubarkan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap mereka yang ingin melengserkannya dari kursi kekuasaannya.

Dan akhirnya Muhammd Bouazizi berhasil melakukan tugas besar menjatuhkan rezim otoriter yang telah berkuasa cukup lama di negaranya, Tunisia. Aksi bakar diri (*Self Immolation*) Bouazizi mendapat respon yang sangat luas melalui pemberitaan media, baik nasional maupun internasional, hal ini diikuti dengan aksi demonstrasi yang menggoncang kekuasaan rezim otoriter Tunisia. Aksi bakar diri Bouazizi dan demonstrasi besar-besaran yang terus berlanjut dipenjuru kota akhirnya memaksa rezim Ben Ali mundur dari kekuasaannya yang selama ini dibangun di atas tangan besi¹³. Bouazizi telah berhasil meruntuhkan mitos kegagalan dalam menjatuhkan rezim-rezim diktator, kematiannya justru telah menepis ketakutan dan menyulut keberanian rakyat untuk melawan penguasa-penguasa diktator yang telah lalim dan menindas mereka.

Tumbangnya rezim Bin Ali, Tunisia, berdampak domino kepada negara-negara tetangganya. Seperti tumbangnya rezim Husni Mubarak, Mesir. Hal ini dikarenakan negara-negara Arab secara umum memiliki problem yang sama; ekonomi, sosial, dan politik¹⁴. Maka fenomena Arab Spring terus berlanjut dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Di sebagian besar negara-negara Arab, rakyat dipimpin oleh rezim-rezim yang otoriter, tertutup dan anti kritik. Rezim-rezim tersebut sebagian besar berkuasa selama puluhan tahun, mulai dari Zainal Abidin Bin Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, Ali Abdullah Saleh di Yaman, Basar Asad di Suriah¹⁵. Begitu juga dengan yang terjadi di Libya, Muammar Kaddafi yang lebih dikenal dengan Kaddafi, telah berkuasa selama 42 tahun sebelum akhirnya jatuh dari kekuasaannya dengan kematian yang tragis¹⁴.

Mungkin sudah menjadi takdir sejarah bahwa perubahan-perubahan politik di negara-negara Arab harus ditempuh dengan jalan paksa, "revolusi". Rakyat telah menentukan sikapnya untuk membebaskan diri dari rezim-rezim otoriter represif. Menurut Al-Jabiry, kebebasan berfikir, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memilih dan mendirikan partai sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) masyarakat Arab sejak beberapa

¹² Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokrasi*, cet. I (Malang: Intrans Publishing, 2014), pp. 27–28.

¹³ Ahmad Sahide and others, 'The Arab Spring: Membaca Kronologi Dan Faktor Penyebabnya', *Jurnal Hubungan Internasional*, 4.2 (2015), 118–29 (pp. 120–22).

¹⁴ <https://kompas.com/read/2011/01/23/06532377/Robo> h.seperti.Teori.Domino

¹⁵ Machmudi Yon, Riyan Hidayat, and Elia Agustina, *Sejarah Timur Tengah Kontemporer; kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya*, cet. I (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2016), pp. 168–69.

dekade yang lalu. Namun, kekuasaan telah membuat para pemimpin mereka melupakannya¹⁶. Perjalanan demokratisasi di negara-negara Arab memiliki catatan-catatan yang memprihatinkan. Yang jelas, proses tersebut telah menuntut sebuah pengorbanan yang sangat mahal, hal yang paling jelas di depan mata adalah banyaknya nyawa yang berjatuh. Beberapa tahun proses perubahan di dunia Arab diperkirakan telah merenggut puluhan ribu nyawa manusia baik itu rezim dan anasirnya, pejuang perubahan, rakyat biasa, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Sehingga menjadi sangat ironis, karena tujuan penting terbentuknya masyarakat dan negara “yang dicita-citakan” adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak bangsanya, bukan justeru sebaliknya.

Ibnu Burdah, dosen tetap Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sangat serius melihat dan memperhatikan isu-isu terkini yang sedang berkembang di dunia Arab memprediksi bahwa selain banyaknya korban nyawa, bahwa bila melihat laporan akibat kekerasan yang terjadi di Libya, Suriah, Yaman, Mesir, Tunisia, Yordania dan Sudan, korban terluka akibat proses perubahan tersebut tidak kurang dari satu juta jiwa. Tidak hanya itu saja, kehancuran infrastruktur fisik dan sosial hasil pembangunan dalam waktu yang lama juga terjadi, sehingga yang tidak kalah penting adalah bahwa hancurnya sendi-sendi sosial dan kembali menguatnya sentimen kesukuan yang selama ini dijaga¹⁷.

Pasca jatuhnya rezim-rezim otoriter di beberapa negara Arab, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman, stabilitas keamanan tidak dapat dipulihkan langsung, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kebebasan yang tercipta sebab proses demokratisasi yang sedang berlangsung ternyata menimbulkan masalah baru, kontestasi kesukuan dan sekte semakin mengemuka dan menguat. Masing-masing suku dan sekte memperebutkan kemenangan, satu sama lain ingin menang sendiri dengan berbagai cara, bahkan terkadang dengan cara-cara yang tidak bertanggungjawab. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak demokrasi, justru ikut menggunakan kebebasan tersebut untuk keberhasilan agenda-agenda mereka, bahkan seringkali mereka justru lebih agresif dan lantang bersuara, sehingga sektarianisme menjadi masalah dan tantangan demokrasi pasca Arab Spring di Timur Tengah.

Perjuangan masyarakat Tunisia untuk mendapatkan kembali hak berpolitik dengan berlandaskan pada Islam yang didalamnya terdapat sistem-sistem Demokrasi, melalui jalan yang sangat terjal dan panjang. Meski demikian, masyarakat Tunisia membuktikan bahwa, mereka bisa bergerak dan meruntukan kekuasaan yang dimiliki pemerintah yang hanya memikirkan diri sendiri, zolim kepada masyarakat kecil, menganiaya mereka yang tidak menuruti kemauan pemerintah, dan menghilangkan hak-hak masyarakat kecil.

c. Demokrasi di Tunisia

Alam demokrasi di negara-negara Arab masih layu, masing-masing sedang menghadapi masalahnya sendiri. Namun proses dan progres terus diupayakan di beberapa negara, dalam hal ini khususnya Tunisia. Tunisia menjadi asa bagi negara-negara Islam di Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan panjang. Tunisia, memimpin dalam hal menuju demokrasi, meski harus memulai kembali membangun sistem dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

¹⁶ Burdah, *Menuju Dunia Arab Baru*, p. 28.

¹⁷ Burdah, *Islam Kontemporer*, pp. 21–22.

Sejak Arab Spring 2010 bergulir, belum nampak tanda-tanda yang memberikan tumbuh suburnya demokrasi secara substantif. Namun Tunisia menjadi sebuah pengecualian, dari Tunisia di mulai gelombang besar Arab Spring sebagai simbol jatuhnya rezim-rezim otoriter dan dari Tunisia pula, harapan untuk bangkit dan menuju alam demokrasi itu di mulai. Setelah jatuhnya rezim bin Ali, Tunisia telah berhasil melangsungkan pemilu secara damai dan kontestasi politik di antara partai-partai yang ada berlangsung kompetitif. Tidak ada monopoli kekuasaan pada individu, dan partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan simpati publik, bahkan berbeda dan lebih maju dari negara-negara Timur Tengah lainnya. Di Tunisia kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam ranah politik praktis.

Sebelum terjadi Arab Spring, Tunisia mengadopsi demokrasi *electoral*, presiden dipilih melalui mekanisme pemilu dengan masa jabatan lima tahun. Akan tetapi setiap kali pemilu Zainal Abidin bin Ali kerap terpilih sebagai presiden, hal ini tidak lepas dari dukungan partai *Constitutional Democratic Party* yang menguasai lebih 80% kursi di parlemen. Kelompok aktivis dan oposisi selalu mendapatkan pengawasan ketat oleh rezim sehingga tidak mudah berkembang, hal ini juga mengakibatkan lemahnya partisipasi publik dalam dinamika sosial politik di Tunisia. Setelah Arab Spring dan bin Ali jatuh, partai-partai politik mulai bermunculan. Setidaknya terdapat empat partai yang mendominasi peta politik di Tunisia di antaranya *An-Nahdhah*, *The Congress For the Republic*, *Ettakatol*, dan *Modernist Democratic Pole and Democratic Progress Party*. Saat ini an-nahdah menjadi partai Islam populer dan mendominasi mayoritas suara, dan disusul dengan partai-partai lainnya¹⁸.

Tunisia terus bangkit dan memperbaiki diri, Januari 2014 Majelis Nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru negara. Pengesahan konstitusi ini merupakan langkah maju untuk membangun demokrasi di Tunisia setelah tiga tahun jatuhnya rezim bin Ali. Konstitusi baru tersebut dianggap sebagai impian rakyat Tunisia, bukti kebangkitan revolusi dan akan menciptakan bangsa sipil demokratik. Persetujuan konstitusi dan kemajuan membuat Tunisia kontras dengan kondisi negara-negara lain di kawasan yang sedang mengalami transisi pasca-Arab Spring. Libya, Mesir, Suriah dan Yaman masih terus bergulat dengan konflik internalnya masing-masing setelah revolusi 2011. Pengesahan konstitusi baru tersebut membuat Tunisia menjadi negara paling progresif di kawasan Konstitusi berisi tentang jaminan kesamaan hak bagi pria dan wanita, menuntut negara mengatasi masalah korupsi, pembagian kekuasaan eksekutif antara perdana menteri dan presiden¹⁹.

Tunisia adalah harapan dan inspirasi bagi negara-negara muslim di Timur Tengah untuk segera kembali berbenah dan bangkit dari keterpurukan, konflik sektarian berkepanjangan, dan perang saudara. Demokrasi memang membutuhkan waktu untuk tumbuh dengan baik di Timur Tengah. Demokrasi Barat yang dikarakteristikan dengan adanya pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, hukum, penghargaan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama, merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara di Timur Tengah. Menerapkan demokrasi secara penuh merupakan prosesi kompleks, apa lagi bagi Timur Tengah demokrasi merupakan konsep

¹⁸ Muhammad Fakhry Ghafur, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya', *Jurnal Penelitian Politik*, 11.2 (2016), 16 (p. 89).

¹⁹ Zaky Al Hamzah, 'Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia', *Republika*, 2014 <https://www.republika.co.id/berita/koran/newsupdate/14/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-barutunisia> [accessed 22 April 2019].

yang masih abstrak²⁰. Namun meski bukan hal mudah, Timur Tengah sedang dalam proses menuju pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Tunisia telah berupaya membuktikannya dengan berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik, memberikan kebebasan berpendapat, memberikan kebebasan kepada yang berbeda keyakinan dan menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dari situ dapat dilihat bahwa konsep demokrasi pada Negara Tunisia merupakan suatu upaya yang terus di galakkan. Namun demikian terdapat prinsip agama Islam yang di anut oleh negara tersebut. Kita dapat melihat kembali sejauh apa hubungan demokrasi yang dari barat dengan prinsip ajaran Islam yang di anut oleh mayoritas masyarakat negara Tunisia. Keduanya terpatri dalam satu sistem negara yang lain sisi dari barat dan sisi yang lain yang Islam. Muhammad Lili Nur Aulia²¹ (Sekretaris Institute Indonesia) mengatakan bahwa terdapat dinamika partai politik sejak tahun 2011 yang terus memanas ketika teribatnya partai politik Ennahda penganut Islam moderat yang terus dilawan oleh kelompok sekuler. Perlawanan kelompok sekuler tersebut dengan alasan ingin menyelamatkan Tunisia dari politik Islam. Bahkan menurut Gannouchi bahwa yang menghambat pertumbuhan demokrasi Tunisia adalah ketika masyarakat terbelah karena warna ideologis, antara kelompok Islamis dan sekuler, antara pro Revolusi dan anti revolusi. Kondisi tersebut menjadi masalah yang sangat kompleks dalam dinamika politik Tunisia.

Kesimpulan

Perjalanan panjang masyarakat Tunisia, dalam menggapai kemerdekaan atas penjajahan pemerintah Tunisia sendiri merupakan jalan yang tidak mudah, terjal dan tajam. Banyak yang menjadi korban atas nama revolusi. Baik secara fisik maupun psikis. Meski demikian perjuangan yang dilakukan tidak hanya atas nama agama akan tetapi, kemanusiaan manusia yang dipertaruhkan, hak-hak juga kewajiban yang diinginkan oleh masyarakat Tunisia, yang menjadi motor penggerak mereka dalam perjalanan menggapai pemerintahan yang demokrasi. Tentu saja, hal ini membutuhkan tumbal dalam perjalanan panjang demokrasi Negara Tunisia.

Kompleksitas proses dan dinamika perjalanan demokrasi di Timur Tengah bukan menjadi alasan untuk meragukan kompatibilitas Islam dan demokrasi. Islam sebagai agama, secara nilai dan ajaran pada dasarnya selaras memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan. Sikap skeptis Barat yang meragukan kompatibilitas Islam dan demokrasi adalah hal yang wajar bila melihat fenomena dan perkembangan baru dunia Arab yang gagal dalam transisi ke demokrasi. Keraguan tersebut tidak saja datang dari Barat, perkembangan pemikiran politik Islam juga melahirkan minimal dua pemikiran terkait kompatibilitas Islam dan demokrasi: mereka yang menolak demokrasi dan menerima demokrasi.

Meski di beberapa negara Timur Tengah proses demokratisasi masih berada dalam ketidakpastian, namun tidak dengan Tunisia. Tunisia justru menjadi asa bagi negara-negara Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan. Tunisia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengangkat seorang pemimpin secara demokratis. Demokrasi Tunisia semakin membaik dengan diresmikannya konstitusi baru yang memberikan

²⁰ Shafira Elnanda Yasmine, 'Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2016), 106–13 (pp. 110–11).

²¹ <https://www.republika.co.id/berita/gewxkz412/pelajaran-besar-dari-tunisia-untuk-demokrasi>

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga Tunisia menjadi pionir feminisme di Timur Tengah. Walaupun tidak bisa kita bandingkan dengan konteks pemerintahan Islam lainnya tapi Tunisia menjadi sistem yang terus bangkit untuk memperbaharui keterpurukan demokrasi dengan melepas pengaruh ideologi yang sekuler, terlalu kanan, maupun sistem monarki. Oleh karena itu, dinamika politik sistem negara menjadi masa transisi apakah akan menuju kehancuran ataukah justru menuju pada kedewasaan demokrasi, dengan demikian masih terdapat optimisme dalam penerapan demokrasi Islam dalam sistem pemerintahan Tunisia di tengah segala bentuk dinamika yang di hadapi.

Referensi

- Adib, Muhammad, and Nur Qomari, 'Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi', *Maqashid*, 1.2 (2018), 18–33
- Al Hamzah, Zaky, "Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia", *Republika*, 2014
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, cet. 1 (Jakarta: Divisi
- Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial | Vol. 12, No. 02 | 2019 | Page | 129 E-ISSN: 2685-791X P-ISSN: 1858-3679**
- Khasanah, N., & Hamzani, A. I. (2019). Relasi Agama dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(4), 391-404.
- Mutakin, Ali, 'ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 01 (2016), 25–42
- Misrawi, Zuhairi, 'Sejarah Baru Demokrasi Tunisia', *Detik*, 2018
- Rahman, Musthafa Abd, 'Hosni Mubarak Mundur', *Kompas*, 2011]
- Sahide, Ahmad, *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*, cet. 1 (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017)
- Sihbudi, M. Riza, *Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1991) ———, *Menyandera Timur Tengah*, Cet. 1 (Jakarta : Ujungberung, Bandung: Mizan ; Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2007)
- Sudrajat, A. (1996). Imam Al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran. *Cakrawala Pendidikan*, 81414.
- Yasmine, Shafira Elnanda, 'Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2016), 106–13
- Yon, Machmudi, Riyan Hidayat, and Elia Agustina, *Sejarah Timur Tengah Kontemporer; kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), 2016)

Dari web

- <https://www.republika.co.id/berita/qewkxz412/pelajaran-besar-dari-tunisia-untuk-demokrasi>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4099965/sejarah-baru-demokrasitunisia> [accessed 22 April 2019]
- <https://www.republika.co.id/berita/koran/newsupdate/14/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-barutunisia> [accessed 22 April 2019].
- <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/12/04005444/hosni.mubarak.mundur?page=all#page1>